

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia. (2023). Analisis kendala penatausahaan barang milik daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 5(2), 45–58.
- Collins, R., Hasan, M., & Rahman, A. (2021). Public sector accounting and financial reporting. *Journal of Public Finance*, 13(1), 1–15.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). *Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hengkeng, H. K., Kalangi, L., & Pusung, R. J. (2023). Evaluasi proses pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 6(2), 1109–1120.
- Krisdayanti. (2019). Analisis pengelolaan aset tetap pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi Daerah*, 4(2), 56–70.
- Kastilong, V. G., Afandi, D., & Latjandu, L. D. (2025). Analisis perencanaan, penggunaan dan penatausahaan aset tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 3(2), 491–500. <https://doi.org/10.58784/rapi.378>
- Koyong, B. E., Afandi, D., & Datu, C. (2025). Evaluasi penatausahaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 3(2), 347–355. <https://doi.org/10.58784/rapi.343>
- Lestari. (2020). Pengaruh SIMBADA terhadap keakuratan data aset Kabupaten Bantul. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 5(1), 22–36.
- Nur, A., & Utami, F. Y. (2022). Proses dan langkah penelitian antropologi: Sebuah literature review. *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika Sosial dan Budaya*, 3(1), 44–68. <https://doi.org/10.55623/ad.v3i1.109>
- Nurjanah. (2022). Implementasi penatausahaan barang milik daerah berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 7(1), 41–55.
- Putra, I. M. (2018). Evaluasi pengelolaan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(1), 75–90.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun*

2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta.

Sari, R., & Rukmana, D. (2019). Analisis penatausahaan aset tetap BMD pada Pemerintah Kota Sukabumi. *Jurnal Akuntansi Publik*, 4(1), 21–35.

Setiawan, A. (2021). Evaluasi pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 5(2), 98–110.

Utama, A., & Wibowo, S. (2021). Evaluasi pengelolaan aset daerah dalam mewujudkan tertib administrasi di Kota Mataram. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 65–79.

Yuliana, & Muid, D. (2018). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penatausahaan barang milik daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 14–28.

Wardani Hamzah, D. A. K., Hidayat, R., & Rahayu, S. (2025). Analisis prosedur penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. *JUREMI: Jurnal Riset Ekonomi*, 4(6), 1365–1378. <https://doi.org/10.53625/juremi.v4i6.10236>



**UPT. PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG**

Nomor Pokok Perpustakaan: 5371002D2020114
Jl. Prof Dr. Herman Johanes, Penfui Timur, Kupang Tengah, Kab. Kupang.
Website: <https://perpustakaan.unwira.com/> e-mail: lib.unwira@gmail.com

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
Nomor: 0148/WM.H16/SK.CP/2026

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Marie Teresa Avilla Manbait Jena
NIM : 33122009
Fakultas/Prodi : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Dosen Pembimbing : 1. Maria Odriana Veronica Moi, S.E., M.Sc
2. Antonius Yohanes William Timuneno, S.Akun., M.S.A
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Skripsi yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **22% (Dua Puluh Dua) %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 19 Februari 2026

Kepala UPT Perpustakaan,


Damianus Dami, S.Ptk.